

**IMPLEMENTASI FUNGSI DAN TUGAS BAGIAN PEMERINTAHAN  
DAN OTONOMI DAERAH DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI  
PENUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**Tika Anggraini, Helmi Edisa, Eka Septiani  
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email :

[tikaanggraini@gmail.com](mailto:tikaanggraini@gmail.com)

[helmiedisa@gmail.com](mailto:helmiedisa@gmail.com)

[ekaseptiani@gmail.com](mailto:ekaseptiani@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the implementation of the functions and duties of the government and regional autonomy divisions in the regional secretariat of the Sungai Penuh city based on law number 23 of 2014 concerning regional government and to determine the implementation of the functions and duties of the government and regional autonomy divisions in the regional secretariat of Sungai Penuh City. based on law number 23 of 2014 concerning regional government. The method used in this research is qualitative method. The informants in this study were 3 employees of the full river area secretariat, and the key informant was the head of the regional autonomy section. This research uses purposive sampling technique. Because the researcher feels that the sample taken knows the most about the problem to be studied by the researcher. The data collection instrument in this study was the result of interviews. The results of the research show that: ( 1) preparation of local government policies. (2) organizing the implementation of regional service tasks. (3) monitoring the evaluation of the implementation of regional service tasks. (4) administrative and apparatus development.*

**Keywords: Government Duties, Government Functions, Regional Autonomy**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi fungsi dan tugas bagian pemerintahan dan otonomi daerah di sekretariat daerah kota sungai penuh berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Untuk mengetahui implementasi fungsi dan tugas bagian pemerintahan dan otonomi daerah di sekretariat daerah kota sungai penuh berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah 4 orang pegawai sekretariat daerah sungai penuh, dan *key informannya* adalah kasubag bagian otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa:(1)penyusunan kebijakan pemerintah daerah. (2)pengorganisasian

pelaksanaan tugas dinas daerah.(3) pemantauan evaluasi pelaksanaan tugas dinas daerah.(4) pembinaan administrasi dan aparatur.

***Kata Kunci: Tugas Pemerintah, Fungsi Pemerintah, Otonomi Daerah***

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pemberian luas kepada Daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari daerah-daerah provinsi, daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Kinerja yang diberikan pemerintahan kota sungai penuh harus secara menyeluruh pada struktur pemerintahan baik di dinas, badan, maupun kantor, sebagai salah satu bagian pemerintah daerah kota sungai penuh, Sekretariat daerah berkewajiban untuk memberikan kinerja dengan maksimal, apalagi perannya yang mengurus semua kepentingan pemerintahan, maka pelayanan yang diberikan haruslah secara maksimal.

Sebagaimana halnya di kantor Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh yang merupakan kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai urusan tentunya sudah memiliki sistem kinerja yang baik dan maju yang ditunjang

dengan penggunaan teknologi, seperti sistem komputerisasi dan layanan internet yang tentunya dapat membuat strategi kinerja makin cepat, tepat dan berkualitas.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, fenomena yang ditemukan pada fungsi dan tugas bagian pemerintahan dan otonomi daerah disekretariat daerah kota sungai penuh ialah :

1. Lamanya petunjuk juknis dan teknis dari pusat dalam melaksanakan tugas bagian pemerintahan.
2. Masih rendahnya nilai SPM kinerja pelayanan dasar dalam melaksanakan pemantauan evaluasi fungsi dan tugas pemerintah.
3. Proses kegiatan yang dilakukan bagian pemerintahan juga terkesan lama dan lambat, dikarenakan sedikitnya atau keterbatasan pegawai pada bagian pemerintahan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi fungsi dan tugas bagian pemerintahan dan otonomi daerah di sekretariat daerah kota sungai penuh berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi fungsi dan tugas bagian pemerintahan dan otonomi daerah di sekretariat daerah kota sungai penuh berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ?

### **Tujuan Penelitian**

Dengan adanya perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi fungsi dan tugas bagian pemerintahan dan otonomi daerah di sekretariat daerah kota sungai penuh berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan implementasi fungsi dan tugas bagian pemerintahan dan otonomi daerah di sekretariat daerah kota sungai penuh berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Implementasi**

Van Meter dan Horn dalam buku Agustino (2012:139) Mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku Agustino(2010:139) Mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksana keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputus-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya,keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

### **Pemerintahan**

Pemerintah menurut Finer (Kuper, 2000: 418) menegaskan empat pengertian, yakni pertama pemerintah menegaskan menegaskan proses pemerintahan/ metode pemerintahan, dimana kewenangan pengoperasian dipegang oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan yang sah. Kedua pemerintah menegaskan pada tempat proses pemerintahan berlangsung. Ketiga pemerintah menegaskan secara langsung orang-orang yang dapat memegang jabatan sebagai pelaksanaan kewenangan. Keempat, pemerintah menegaskan dari segi bentuk, cara atau sistem dalam masyarakat, seperti susunan struktur pengelola instansi, serta kaitan antara orang-orang yang memerintah dan orang yang diperintah (Labolo, 2014).

### **Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan fenomena politik yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi (penjagadan, penduniaan) dan demokratis, apalagi jika dikaitkan dengan era tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerjasama regional (*sijori*), perubahan pola atau sistem informasi global. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

### **Tugas Pokok Dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah
2. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dinas daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah
4. Pembinaan administrasi dan aparatur daerah

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Administrasi.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Thorin (2013:2) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh atau mendalam) dan

rumit. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2014:211).

#### **Lokasi Penelitian**

Pada Penelitian ini penulis memilih lokasi atau tempat yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan dikumpulkan yaitu dilakukan di kantor Sekretariat Daerah kota sungai penuh yang beralamat di jln.gajah mada.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Untuk memudahkan pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder:

##### 1. Data primer

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi kasus yang bersangkutan yang mana data tersebut dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Sumber data primer dari penelitian ini yaitu berupa wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan.

##### 2. Data sekunder

Yaitu data yang berfungsi sebagai pelengkap. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti data, arsip-arsip surat dan dokumen-dokumen yang tersedia.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Fungsi tugas bagian pemerintahan dan otonomi daerah disekretariat daerah kota sungai penuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.**

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Walikota sungai penuh Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah kota sungai penuh. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kota sungai penuh mempunyai fungsi sebagai berikut :

##### 1. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah

Indikator Penyusunan kebijakan pemerintah daerah didefinisikan sebagai suatu prosedur penyusunan kegiatan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah daerah serta faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. dapat dipahami bahwa pada indikator penyusunan kebijakan pemerintah daerah tugas dan fungsi bagian tata pemerintah disekretariat daerah ialah menyusun laporan tahunan daerah seperti LPPD, LKPJ, dan SPM, dan juga menyusun bahan kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama antar daerah, menyusun bahan pembinaan sosialisasi, menyusun bahan koordinasi penetapan batas dan rupa bumi wilayah kecamatan, dan koordinasi kecamatan.

##### 2. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dinas daerah

Indikator pengorganisasian pelaksana tugas dinas daerah ialah untuk mengetahui apakah fungsi dan tugas pengorganisasian ditata pemerintahan yang selama ini sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan disekretariat daerah kota sungai penuh. dipahami bahwa indikator pengorganisasian pelaksana tugas dinas daerah dibagian tata pemerintahan ,sudah terlihat sesuai dengan yang diinginkan dan juga sesuai dengan target dalam pengorganisasian dan monitoring evaluasi kegiatan serta koordinasi terkopimda relatif sesuai dengan moment.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah  
Indikator Pemantauan dan evaluasi pelaksana kebijakan pemerintah daerah didefinisikan sebagai prosedur sistem pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi pada bagian tata pemerintahan. dapat dipahami bahwa pada indikator pemantauan dan evaluasi pelaksana kebijakan pemerintah daerah, tugas dan fungsi bagian pemerintahan di sekretariat daerah kota sungai penuh dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan ialah berdasarkan laporan tahunan daerah sistem evaluasi dari tiga laporan yang diterima ialah capaian kinerja pemerintah LPPD, capaian nilai efktivitas dan efisiensi anggaran tahun kegiatan LKPJ, dan juga SPM kinerja pelayanan dasar.
4. Pembinaan administrasi dan aparatur daerah  
Indikator Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah sebagai suatu prosedur aspek-aspek yang menjadi sasaran pembinaan administrasi dan aparatur. dapat diketahui pada indikator pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah ,fungsi dan tugas bagian tata pemerintahan dalam pembinaan aspek sasaran pada dasarnya dalam penyelesaian ataupun pembinaan semuanya difasilitasi oleh pusat tapi petunjuk juknis dan teknis dari pusat lambat.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah tugas dan fungsi bagian tata pemerintah disekretariat daerah ialah menyusun laporan tahunan daerah seperti LPPD, LKPJ, dan SPM, dan juga menyusun bahan kerja sama dengan pihak ketiga dan kerja sama antar daerah, menyusun bahan pembinaan sosialisasi, menyusun bahan koordinasi penetapan batas dan rupa bumi wilayah kecamatan, dan koordinasi kecamatan. Pada indikator pengorganisasian pelaksana tugas dinas daerah di tata pemerintahan , terlihat sudah sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai target dalam pengorganisasian dan monitoring evaluasi kegiatan serta koordinasi terkopimda relatif sesuai dengan moment. Pada indikator pemantauan dan evaluasi pelaksana kebijakan pemerintah daerah, tugas dan fungsi bagian pemerintahan di sekretariat daerah kota sungai penuh dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan ialah berdasarkan laporan tahunan daerah sistem evaluasi dari tiga laporan yang diterima ialah LPPD, LKPJ, dan juga SPM. Pada indikator pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah ,fungsi dan tugas bagian tata pemerintahan dalam pembinaan aspek sasaran pada dasarnya dalam penyelesaian ataupun pembinaan semuanya difasilitasi oleh pusat tapi petunjuk juknis dan teknis dari pusat lambat.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Eliyusnadi,S.Kom,M,Si selaku ketua STIA-NUSA Sungai Penuh.
2. Bapak Helmi Edisa,SE.,MM, selaku Pembimbing Utama dan Ibu Eka Septiani S,Sos.M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Kepala Sekretariat Kota Sungai Penuh dan staf yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti.
4. Bapak/Ibu Dosen STIA-NUSA Sungai Penuh yang telah mendidik serta membagi ilmunya dengan penulis sehingga sampai ketahap penyelesaian Skripsi ini.
5. Terima kasih kepada LPPM STIA Nusantara sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN) serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian peneliti ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012) :Dasar-Dasar Kebijakan Publik.Bandung:Alfabeta.
- Awang, Azam. (2010). *Impelementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Burham Bungin.(2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rajawali Pers
- Hamdin, Mucchlis.(2002) .Bunga Rampai Pemerintahan. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Kuper, Adams dan dan Jessica Kuper. (2000). *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Labolo, Muhadam. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan Satu Kajian, Teori, Konsep,dan Pengembangannya*. Jakarta:Rajawali Pers
- Labolo. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suaru Kajian, Teori, dan Pengembangannya Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleng, Lexy J (2014). *Karakteristik informan penelitian*
- Moleong, Lexy J.(2015). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT Ramaja Rosdakarya.
- Muslim (2013). *Tugas dan Fungsi Pemerintahan*. Diakses 21 April 2019.
- Mulgam (2009). *Tugas Pemerintahan Dalam mengatasi Bencana Alam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha (2000). *Metedologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bima Aksara.
- Nuralam, Adys, Abdul Kadir dan Ma'ruf, (2017). *Jurnal Administrasi Publik*.Vol3 No.3 Diakses 21 April 2019.
- Ridwan, HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Geafindo Persada.
- Sembiring, Masana. (2012). *Pemberdayaan Upaya Mewujudkan pemerintahan*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Syafiie. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie. (2011). *Etika pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perundang-undangan**
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah.
- Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Yusthika Desrinawati, Indarja, dkk, ‘Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah” mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2016.